

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ar. Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Azwar, AH. 1996. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2): 100–109.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2): 147-160.
- Farag, M. S., & Elias, R. Z. (2016). The relationship between accounting students' personality, professional skepticism and anticipatory socialization. *Accounting Education*, 25(2), 124–138.
- Ganie Rochman, 2000, *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta
- Garcia, A. C., & Garcia-garcia, J. 2010. Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities. *Local Government Studies*, 36(5): 679-695.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Governance for Sustainable Human Development. The United Nations Development Programmed. Governance: Sound Development Management. Asian Development Bank. 1995.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & et al. (2009). *Multivariate data analysis (7th ed.)*. Upper Saddle River: Prentice Hall
- Hanifah, F. F., Suryarini, T., & Mukibad, H. 2017. Pengaruh Kompetisi Politik, IPM, Dan Leverage Terhadap Ketersediaan Dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1-23, September 2017.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 303-360.
- Khasanah, N. L., & S. N. Rahardjo. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan temuan Audit Terhadap tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 3 No. 3, Hal. 1-11.
- Khasanah, I. N., Yuhertiana, I., & Setyo, G. 2017. Determinan Aksesibilitas internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi Di

- Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1-20, September 2017
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. SANKRI: Buku 1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara. Penerbit: Lembaga Administrasi Negara
- Maulana, C & Handayani, B. D. 2015. Pengaruh Karakteristik Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap tingkat Pengungkapan Wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, Universitas Negeri Semarang.
- Medina, F. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemda. Penelitian FEUNDIP 2012
- Nadir, R., Arsyad, M., & Tawakkal. 2019. Analisis Determinan Transparansi laporan Keuanagn Pemerintah Daerah Melalui E-government. Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (pp.464-470)
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2): 89–104.
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. 2015. Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S2*, Volume 2, No. 1 Tahun 2015.
- Rahim, W. M., & Martani, D. 2016. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Konferensi Regional Akuntansi III, Jember*, April 2016.
- Ratmono, D. 2013. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet: Pengujian Teori Institusional dan Keagenan. *Media Ilmiah Akuntansi*, 1(2): 28-48.
- Republik Indonesia. 1992. Peraturan Menteri Kesehatan No 986/Menkes/Per/11/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit
- Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
- Rosita, L. R. A., & Arifin, J. 2017. Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1-26, September 2017.
- Salle, Agustinus. 2016. Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Saxton, G. D., Kuo, J. S., & Ho, Y. C. (2012). The Determinants of Voluntary Financial Disclosure by Nonprofit Organizations. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(6) 1051–1071
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities On The Internet. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1): 56–92.
- Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20: 571-611.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE
- Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin, Achmad. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Indeks.
- Verawaty, V. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, September 2015.
- Winarna dan Murni. 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Prosiding SNA X*, Surakarta.